

**PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT MINANGKABAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

ARDIANTO
1610012111162

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

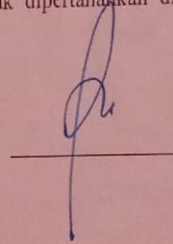
PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 20/Pid-02/VIII-2021

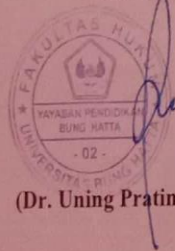
Nama : Ardianto
NPM : 1610012111162
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Adat
Minangkabau

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Senin** Tanggal **Enam Belas** Bulan
Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** untuk dipertahankan dihadapan
penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)

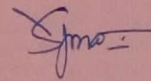


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

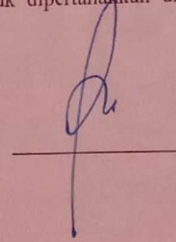
PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 20/Pid-02/VIII-2021

Nama : Ardianto
NPM : 1610012111162
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Adat
Minangkabau

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Senin** Tanggal **Enam Belas** Bulan
Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** untuk dipertahankan dihadapan
penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)

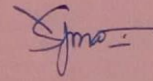


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU

Ardianto¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: ardiardianto2021@gmail.com

ABSTRAK

Perilaku kekerasan seksual terhadap anak akan mengakibatkan terjadinya gangguan mental terhadap anak. Hukum adat Minangkabau dapat di artikan sebagai suatu aturan bagaimana tata cara masyarakat dalam suatu pergaulan. Dalam hukum adat Minangkabau hukum adat tertuang dalam Undang-undang *Nan duo puluh*, Undang-undang *Nan duo puluh* ini mengenai tentang hukum delik adat yang ada di Minangkabau “ hukum pidana adat” terutama pada suatu tindakan kesusilaan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimanakah eksistensi hukum adat Minangkabau dalam penerapan sanksi terhadap kekerasan seksual? 2). Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum adat? Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data di analisis secara langsung dari hasil wawancara

Simpulan : 1) Eksistensi dalam penerapan sanksi terhadap tindak kekerasan seksual pada anak terdapat dalam Undang-undang Nan duo puluh dimana dalam Undang-undang ini mengatur tentang semua delik adat. sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa denda yaitu seekor kerbau atau sejumlah uang seharga seekor kerbau. 2) Penyelesaian tindak kekerasan seksual dalam hukum adat Minangkabau yaitu dapat dilakukan dengan musyawarah keluarga yang di hadiri oleh ninik mamak kedua belah pihak.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Hukum Adat Minangkabau, Kekerasan Seksual, Anak

**SEXUAL VIOLENCE RESOLVING ON CHILDREN IN PERSPECTIVE
MINANGKABAU CUSTOMARY LAW**

Ardianto¹, Uning Pratimaratri¹

¹Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail: ardiardianto2021@gmail.com

ABSTRACT

Sexual violence against children will result in mental disorders in children. Minangkabau customary law can be interpreted as a rule of how the community behaves in an association. In Minangkabau customary law, customary law is contained in the Nan duo puluh Law. The formulation of the problem in this thesis is 1). How is the existence of Minangkabau customary law in the application of sanctions against sexual violence? 2). What is the process for resolving criminal acts of sexual violence against children in customary law? This research uses a sociological juridical approach. The data sources used are primary data and secondary data. The data are analyzed directly from the results of interviews. Conclusions: 1) The existence of sanctions against acts of sexual violence against children is contained in the Nan duo puluh Law which regulates all customary offenses. The sanctions given to the perpetrators are in the form of a fine, namely a buffalo or a sum of money for a buffalo. 2) Settlement of acts of sexual violence in Minangkabau customary law, which can be done by family deliberation attended by ninik mamak from both parties.

Keywords: Crime, Minangkabau Customary Law, Sexual Violence, Children

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masala.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pidana.....	8
1. Pengertian Pidana.....	8
2. Tujuan Pidana.....	8
3. Jenis-jenis Pidana.....	10
B. Tinjauan Tentang Hukum Adat Minangkabau.....	20
1. Jenis Hukum Adat Minangkabau.....	24
2. Hukum Peradilan Adat di Minangkabau.....	26
3. Delik Adat.....	27
4. Sifat-sifat Hukum Adat.....	29
C. Tinjauan Tindak Kekerasan Seksual.....	11
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	11
2. Pengertian Anak Sebagai Korban.....	12
3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	15
4. Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	15
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Eksistensi hukum adat Minangkabau dalam penerapan sanksi Kekerasan seksual terhadap anak.....	31
B. Proses penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum adat Minangkabau.....	35
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	